

# TERMS OF REFERENCE (TOR)

## SEMINAR NASIONAL

### TENTANG

## PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN MELALUI BINTER BERSAMA SELURUH KOMPONEN BANGSA DALAM RANGKA MENDUKUNG KEPENTINGAN NASIONAL

### A. LATAR BELAKANG

Pertahanan negara pada hakekatnya merupakan segala upaya pertahanan yang bersifat semesta dimana penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat<sup>1</sup>. Kesemestaan mengandung makna pelibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Sishankamrata yang dinyatakan dalam UUD Negara RI tahun 1945 pasal 30 dan UU RI No 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta, yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan seluruh sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh *pemerintah* dan diselenggarakan secara total, terpadu terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara dan menjaga keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman<sup>2</sup>. UU RI No 34 tentang TNI mengamanatkan bahwa Tugas Pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan

---

<sup>1</sup>. "Hakekat Pertahanan Negara" Pertahanan negara pada hakekatnya merupakan segala upaya pertahanan yang bersifat semesta dimana penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri utk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008 halaman 43.

<sup>2</sup>. Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta, yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan seluruh sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh *pemerintah* dan diselenggarakan secara total, terpadu terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara dan menjaga keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Undang Undang RI No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 1 ayat 2

negara<sup>3</sup>. Tugas pokok itu dilaksanakan dengan Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Pada pasal 7 ayat 2b point 8 mencantumkan salah satu Tugas TNI dalam OMSP adalah memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta<sup>4</sup>. Tugas untuk memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya diurai ke dalam tugas-tugas TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU. Tugas memberdayakan wilayah pertahanan adalah tugas yang sangat penting, tugas yang harus dilakukan secara terus menerus dan merupakan tugas utama untuk dapat mewujudkan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang konstitusional. Realitasnya, tugas TNI dalam memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya itu dilaksanakan di daerah-daerah baik itu kekuatan terpusat maupun kekuatan kewilayahan.

Dalam sejarah perjuangan Indonesia, merebut dan menegakkan kemerdekaan pada tahun 1945 terlihat dengan jelas bahwa semangat kerakyatan, semangat kesemestaan dan semangat kewilayahan telah menjadi bagian dari semangat juang, semangat nasionalisme dalam mengusir penjajah. Pada saat itu seluruh komponen bangsa sesuai potensi yang dimiliki ikut serta menghadapi penjajah yang disebut dengan Perang Rakyat Semesta. Pada waktu itu, Angkatan perang Indonesia disusun dalam *pasukan mobile* dan *pasukan teritorial*. Pasukan mobile untuk melaksanakan penghambatan gerakan musuh dan menjadi tenaga penggempur dalam susunan Batalyon, Kompi dan Peleton. Pasukan teritorial mengadakan penjagaan disetiap kabupaten, menyebar menjadi inti gerakan gerilya rakyat di bagian daerah yang lebih kecil seperti Distrik dan Onderan atau Kecamatan. Organisasi kewilayahan ketika itu adalah Komando Militer Daerah (KMD), Komando Distrik Militer (KDM), Komando Omdar Distrik Militer (KODM) dan kader desa. Gelar inilah yang menjadi cikal bakal Komando Teritorial (Koter) yang saat ini disebut dengan Komando Kewilayahan (Kowil)<sup>5</sup>.

Selanjutnya dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia terjadi berbagai peristiwa pemberontakan bersenjata dan makar politik seperti pemberontakan PKI Madiun, PRRI/Permesta, DI/TII, G.30S/PKI, GAM, RMS dan lain-lain. Dengan dukungan rakyat yang penuh kesadaran, keikhlasan dan rasa tanggung jawab untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia semua peristiwa tersebut dapat diatasi. Kerjasama dan solidaritas inilah yang disebut *kemanunggalan*

---

<sup>3</sup>.Tugas Pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.UU RI No. 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat 1,

<sup>4</sup> . Ibid Pasal 7 ayat 2b point 8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta.

<sup>5</sup> . Skep KSAD No Skep /98/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 Bujuk Induk tentang Binter halaman 4.

*TNI-Rakyat*. Menyadari bahwa Kemanunggalan TNI-Rakyat merupakan salah satu pilar pendukung kekuatan NKRI, maka perlu ditingkatkan pengimplementasiannya agar terpelihara kesinambungannya.

Dalam suatu peperangan, aspek non fisik sangat berpengaruh terhadap pencapaian tugas pokok. Aspek non fisik di lingkungan daerah operasi berupa ruang, alat dan kondisi juang, diantaranya kemanunggalan TNI-Rakyat. Oleh karena itulah sejak awal sebelum adanya UU RI No.3/2002 tentang pertahanan negara dan UU RI No 34/2004 tentang TNI, pada dasarnya TNI telah melakukan berbagai upaya membangun lingkungan daerah operasi. Namun demikian, Pembinaan Teritorial yang dilakukan oleh TNI/TNI AD tersebut, sampai dengan saat ini belum memiliki landasan hukum seperti pada Pasal 7 ayat 2b point 8 Undang-undang RI No 34 tahun 2004 yang menyatakan bahwa pemberdayaan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan "Sistem Pertahanan Semesta"<sup>6</sup>. Di sisi lain, pada Pasal 8d menyatakan "Melaksanakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Di Darat"<sup>7</sup>, maka diperlukan penjabaran dalam bentuk Peraturan pemerintah/Kepres/Permen sehingga dapat dijadikan sebagai landasan operasional dalam pelaksanaan pembinaan teritorial. Dalam melaksanakan tugas pemberdayaan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya, TNI menggunakan metoda Pembinaan Teritorial atau Binter dalam bentuk kegiatan yang dilakukan TNI baik secara berdiri sendiri maupun bersama-sama dengan unsur-unsur diluar TNI untuk membantu pemerintah dalam menyiapkan kekuatan pertahanan yang meliputi wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya serta terwujudnya kemanunggalan TNI-Rakyat. Berbagai permasalahan pembinaan teritorial dalam pelaksanaannya dilapangan, seperti *belum adanya kesamaan persepsi penyelenggaraan Pembinaan Teritorial; belum terumuskannya kesepakatan tataran kewenangan yang meliputi pembinaan sumber daya nasional di daerah dan pemberdayagunaannya bagi kepentingan pertahanan, serta belum tergambarkannya konsepsi tentang penyelenggaraan pembinaan teritorial selama dan sesudah perang*<sup>8</sup>. Di sisi lain, pengimplementasian Pembinaan Teritorial yang harus dilaksanakan instansi pemerintah dengan yang telah dilaksanakan oleh TNI khususnya pengimplementasian

---

<sup>6</sup> .Pemberdayaan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan "Sistem Pertahanan Semesta" dan pasal 8d. Melaksanakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Di Darat. UU RI No 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat 2b point 8,

<sup>7</sup> . Ibid. Pasal 8d. Melaksanakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Di Darat.

<sup>8</sup> . Berbagai permasalahan pembinaan teritorial dalam pelaksanaannya dilapangan, seperti *belum adanya kesepahaman visi, misi dan persepsi penyelenggaraan pembinaan teritorial; belum terumuskannya kesepakatan tataran kewenangan yang meliputi pembinaan sumber daya nasional di daerah dan pemberdayagunaannya bagi kepentingan pertahanan; serta belum tergambarkannya konsepsi tentang penyelenggaraan pembinaan teritorial selama dan sesudah perang*. Danpusterad, Seminar Nasional-Interaksi Teritorial, halaman 5.

dalam mendukung penyiapan Sishanneg belum terlihat keterpaduannya. Sebagai contoh dalam penyiapan RUTR Wilayah pertahanan dan RUTR Daerah/Nasional, belum terimplementasikannya *apa dan* bagaimana program pengelolaan sumber daya nasional terakomodasi dan terintegrasi dalam program pembangunan nasional bagi kepentingan kesejahteraan dan pertahanan keamanan.

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia serta dalam dinamika penyelenggaraan pembangunan nasional telah terbukti bahwa sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta menjadi sistem yang mampu melawan penjajah dan berhasil menjadikan Indonesia negara merdeka dan berdaulat. Dalam menyelenggarakan pembangunan nasional, pemerintah masih menempatkan aspek kesejahteraan sebagai prioritas. Kepentingan nasional Indonesia adalah kepentingan bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita nasional yang merupakan karsa nasional pada strata paling tinggi dan dimensi waktu yang tidak terbatas dan kepentingan tercapainya Tujuan Nasional. Lebih lanjut, ada 3 kaedah pokok di dalam mewujudkan kepentingan nasional yaitu: *Pertama*, Bahwa **tujuan nasional** itu adalah tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang berdasar Pancasila dan UUD 1945. *Kedua*, Bahwa cara dalam mencapai tujuan nasional itu dilaksanakan melalui pembangunan nasional secara konseptual berdasarkan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. *Ketiga*, Bahwa sarana yang digunakan adalah seluruh potensi dan kekuatan nasional meliputi geografi, demografi dan kondisi sosial yang didayagunakan secara menyeluruh dan terpadu, terarah, efektif dan efisien. Bangsa Indonesia sangat menyadari potensi dan kekuatan nasional tersebut dalam pemanfaatannya belum efektif sebagai akibat pembinaan dan pengelolaan yang terbatas/belum maksimal, terlebih kondisi anggaran pembangunan nasional yang masih sangat terbatas. Menyadari bahwa TNI adalah bagian integral dari pemerintah selaku penyelenggara pembangunan nasional, maka potensi yang dimiliki TNI wajib diberdayakan untuk mendukung pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Sebagai metoda yang relevan dalam sinkronisasi kinerja sesuai fungsi yang ada dalam TNI dilaksanakan melalui Pembinaan Teritorial. Implementasi Pembinaan Teritorial dalam mendukung pembangunan nasional dapat lebih jelas realisasinya bila dilihat melalui konsep Bhakti TNI (Operasi Bhakti dan Karya Bhakti) sebagai salah satu metode dari kegiatan Pembinaan Teritorial. Sebagai contoh, pelaksanaan Operasi Bhakti TNI dalam kegiatan mengatasi bencana alam Tsunami, gempa bumi yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, dan kegiatan TMMD yang sudah menjadi program TNI bekerja sama dengan

pemerintah daerah, sesuai Kepmen No. 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah.

Keberhasilan pembangunan nasional sesuai yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 adalah merupakan salah satu prasyarat dalam mendukung terselenggaranya ketahanan nasional. Hal ini dapat dilihat pada konsep pembangunan pertahanan setiap negara dalam mengalokasikan besarnya anggaran untuk mendukung pertahanan. Indonesia masih termasuk negara yang mengalokasikan anggaran pertahanan yang rendah diantara negara-negara Asia bahkan Asia Tenggara (0,8% PDB). Hal ini diakibatkan prioritas anggaran nasional masih mengejar ketertinggalan dalam hal kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan. Menyadari bahwa **Konsepsi Ketahanan Nasional** adalah upaya untuk memanfaatkan dan memadukan segenap potensi meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terbagi dalam 8 (delapan) aspek yang disebut Astagatra (geografi, sumber kekayaan alam dan kependudukan sebagai Tri Gatra dan Idiologi, politik, ekonomi, Sosial Budaya dan Hankam sebagai Panca Gatra)<sup>9</sup>, maka pembinaan aspek kehidupan tersebut adalah upaya menciptakan Ketahanan Nasional. Dalam rangka mewujudkan Ketahanan Nasional maka TNI/TNI-AD melaksanakan kegiatan Pembinaan Teritorial yang pada hakekatnya adalah kegiatan penyiapan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan pertahanan semesta serta upaya untuk membangun, memelihara, meningkatkan dan memantapkan kemandirian TNI-Rakyat melalui kegiatan bantuan untuk mengatasi kesulitan masyarakat. Binter dalam menunjang pembangunan nasional maupun daerah dapat ditinjau dari dua sisi kepentingan yakni: *pertama*, Binter dalam menunjang ketahanan nasional di daerah berkewajiban untuk membina ketahanan nasional bidang Ipoleksosbudhankam sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembinaan ketahanan nasional sebagai suatu keseluruhan. *Kedua*, Binter berkewajiban untuk membantu terwujudnya tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta sikap dan perilaku warga Indonesia untuk wajib bela negara sebagai konsekuensi diadanya sistem pertahanan keamanan rakyat semesta sesuai UUD 1945<sup>10</sup>. Merupakan hal yang faktual, didalam memperlancar penyelenggaraan agenda ditingkat nasional dan daerah, oleh sebab itu maka manfaat Pembinaan Teritorial dapat lebih menunjang pemahaman wawasan kebangsaan,

---

<sup>9</sup>. Ketahanan Nasional adalah upaya untuk memanfaatkan dan memadukan segenap potensi meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terbagi dalam 8 (delapan) aspek yang disebut Astagatra (geografi, sumber kekayaan alam dan kependudukan sebagai Tri Gatra dan Idiologi, politik, ekonomi, Sosial Budaya dan Hankam sebagai Panca Gatra) Buku Ketahanan Nasional Karangan Soemarno Soedarsono tahun 1997 halaman 3.

<sup>10</sup>. Buku Bahan Kuliah Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di darat untuk Kursus Strategi Perang Semesta oleh Mayjend TNI Hotmangaraja Panjaitan halaman 31.

meningkatnya kesadaran berbangsa dan bernegara, termasuk didalamnya kesadaran politik, baik pada pelaksanaan Pilkada dan rangkaian penyelenggaraan agenda nasional.

Memahami permasalahan tersebut di atas, khususnya yang menyangkut belum adanya kesamaan persepsi penyelenggaraan pembinaan teritorial, belum terumuskannya kesepakatan tataran kewenangan yang meliputi pembinaan sumber daya nasional di daerah dan pemberdayaannya bagi kepentingan pertahanan, maka dipandang perlu dilaksanakan Seminar tentang Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Melalui Binter Bersama Seluruh Komponen Bangsa Dalam Rangka Mendukung Kepentingan Nasional.

## **B. TUJUAN DAN MANFAAT SEMINAR**

1. Tercetusnya pokok-pokok pemikiran yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam merumuskan konsep strategi implementasi Binter dalam rangka Sishanta.
2. Tercetusnya rekomendasi yang mendorong adanya kemauan politik untuk melakukan regulasi Undang-undang RI No. 34 tahun 2004 tentang TNI khususnya pasal 7 dan 8, sebagai payung hukum yang merupakan landasan operasional dalam penyelenggaraan Pembinaan Teritorial guna mendukung pembangunan nasional.
3. Terbangunnya suatu pemahaman dan komitmen bersama yang lebih kuat bahwa masalah Binter dalam rangka pertahanan bukan hanya masalah pemerintah, apalagi masalah TNI semata, melainkan masalah dari segenap komponen bangsa yang harus dipikirkan dan dipecahkan secara bersama-sama. Sehingga menjadi lebih jelas peran, fungsi dan tugas Binter TNI di masa kini dan yang akan datang.
4. Tersosialisasinya pemberdayaan wilayah pertahanan dalam membantu pemerintah untuk menyiapkan potensi wilayah menjadi kekuatan pertahanan dalam rangka OMP dan OMSP, sehingga dapat memberdayakan komponen cadangan dan komponen pendukung.
5. Untuk mendapatkan ide-ide sebagai bahan masukan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran guna menyusun konsep strategi dalam membangun kemampuan dan kekuatan TNI (sebagai komponen Utama Sistem Pertahanan Negara) yang efektif dalam menghadapi ancaman pertahanan pada masa depan.
6. Terbangunnya kesadaran Bela Negara seluruh komponen Bangsa dalam rangka mewujudkan ketahanan Nasional.

## C. TOPIK DAN PEMBICARA

### 1. Topik I : “Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Melalui Pembinaan Teritorial (Binter) Dalam Rangka Pertahanan Negara”.

#### a. Tujuan :

- 1) Meningkatnya pemahaman tentang perubahan lingkungan strategis dan dampak yang ditimbulkan terhadap pelaksanaan, peran, tugas dan fungsi Binter TNI dimasa lalu, saat ini dan yang akan datang.
- 2) Meningkatnya pemahaman tentang hakekat ancaman pertahanan pada masa kini dan masa depan serta implementasi Pembinaan Teritorial (Binter) untuk menghadapi ancaman tersebut.
- 3) Terwujudnya penyiapan RUTR wilayah pertahanan, RUTR daerah dalam program pengelolaan sumber daya nasional secara terakomodasi dan terintegrasi untuk kepentingan kesejahteraan dan pertahanan negara.
- 4) Tercetusnya pokok-pokok pemikiran yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam merumuskan konsep strategi implementasi Binter dalam rangka Sishanta.

#### b. Isu-isu penting :

- 1) Perubahan lingkungan strategis seperti isu krisis energi, pencemaran lingkungan, krisis global di bidang moneter, krisis pangan, *climate change*, terorisme dan *clash of civilization*.
- 2) Potensi konflik horisontal dan vertikal yang bersumber dari kondisi potensi wilayah seperti konflik perbatasan dalam skala regional dan global.
- 3) Masih adanya stigmatisasi di masyarakat mengenai Dwi Fungsi ABRI di masa lalu yang disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis.
- 4) Perubahan Hakekat Ancaman (internal/eksternal dan tradisional/non tradisional) pada lingkup global, regional maupun nasional.

- 5) Minimnya anggaran di sektor pertahanan yang berpengaruh terhadap pembangunan kekuatan dan kemampuan TNI.
- 6) Persepsi masyarakat mengenai pertahanan negara semata-mata merupakan urusan TNI.
- 7) Ketidakmampuan pemerintah dalam memenuhi kualitas dan kuantitas peralatan tempur TNI, sehingga kemampuan TNI ketinggalan dibandingkan dengan negara tetangga.

**c. Pembicara.**

- 1) Pembicara I : Prof. Dr. Juwono Sudarsono, Menhan RI Jakarta.
- 2) Pembicara II : Prof. DR. A.A. Banyu Parwita. Pembantu Rektor II UNPAR ,Bandung.

**d. Penanggap.**

- 1) Penanggap I : Prof. Ir. Frans Umbudatta, M.AAP. Sc, Phd. Rektor UNDANA Kupang.
- 2) Penanggap II : PATER. DR. Cosmos Fernandes Spd,MA. Rektor UNWIRA,Kupang.

**e. Moderator** : Dr. Mangadar Situmorang, Dosen UNPAR Bandung.

**2. Topik II : “Implementasi Pembinaan Teritorial (Binter) Dalam Mendukung Pembangunan Nasional”.**

**a. Tujuan :**

- 1) Terbangunnya suatu pemahaman dan komitmen bersama yang lebih kuat bahwa tugas-tugas yang berkaitan dengan Binter dalam rangka pertahanan bukan hanya tanggung jawab TNI melainkan tanggung jawab segenap komponen Bangsa.
- 2) Meningkatnya kualitas penyiapan dan pemanfaatan Binter TNI/TNI-AD dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
- 3) Tercetusnya rekomendasi yang mendorong adanya kemauan politik untuk melakukan regulasi Undang – undang RI No 34 tahun 2004 tentang TNI khususnya pasal 7 dan 8, sebagai payung hukum

yang merupakan landasan operasional dalam penyelenggaraan pembinaan teritorial (Binter).

4) Tersusunnya rumusan Strategi dalam penyiapan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung Sistem Pertahanan Semesta melalui Pemberdayaan Wilayah Pertahanan dengan kegiatan Binter.

**b. Isu-isu Penting :**

1) Kurang efektifnya koordinasi antara TNI, Pemerintah dan komponen Bangsa lainnya dalam penyiapan, penyelenggaraan pembinaan Teritorial untuk mendukung pembangunan Nasional.

2) Kurangnya respon pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan Bhakti TNI. Contoh : beberapa daerah kurang mendukung pelaksanaan kegiatan TMMD walaupun sudah ada Kepmen No: 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007 tentang hibah dan bantuan daerah.

3) Sebagian Pemerintah daerah belum sepenuhnya memahami kepentingan pembangunan dalam rangka pertahanan Negara.

4) Program pembinaan teritorial oleh Satkowil TNI belum tersosialisasikan secara maksimal.

**c. Pembicara.**

1) Pembicara I : Diah Anggraeni, SH, MM. Sekjen Departemen Dalam Negeri. Jakarta.

2) Pembicara II : Ir.H. Joko Widodo, Wali Kota Solo.

**d. Penanggap.**

1) Penanggap I : Prof. DR. Komang Gede Bendesa. Pembantu Rektor I UNUD Denpasar Bali.

2) Penanggap II: DR. Made Suyana Utama, Lektor Kepala UNUD Denpasar Bali.

**e. Moderator** : Miing ( Bagito ) Jakarta.

**3. Topik III : “Implementasi Pembinaan Teritorial (Binter) Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Nasional”.**

**a. Tujuan :**

- 1) Terwujudnya rumusan pokok-pokok pikiran tentang sinkronisasi penyelenggaraan Binter TNI/TNI-AD, dengan pemerintah dan komponen bangsa lainnya dalam rangka mewujudkan ketahanan Nasional.
- 2) Terwujudnya konsepsi pemberdayaan wilayah pertahanan melalui Binter dalam membantu pemerintah untuk menyiapkan potensi wilayah menjadi kekuatan pertahanan.

**b. Isu-isu Penting :**

- 1) Belum dipahaminya Binter TNI/TNI-AD secara utuh oleh seluruh komponen bangsa.
- 2) Program pembangunan Nasional belum selaras dan terpadu dengan Binter TNI/TNI-AD dalam mendukung Sishanta.
- 3) Kegiatan binter pertahanan belum mendapat dukungan secara optimal oleh pemerintah.
- 4) Masih ada kekhawatiran masyarakat terhadap TNI/TNI-AD, akan memanfaatkan kegiatan Binter untuk melaksanakan kegiatan politik praktis (Pilkada/Pemilu).

**c. Pembicara.**

- 1) Pembicara I : Prof. Dr. Enoch Markum. Ketua Lembaga Riset Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Depok.
- 2) Pembicara II : Mayjen TNI (Purn) Sudrajat, Dubes RI di Beijing Cina.

**d. Penanggung.**

- 1) Penanggung I : Prof. Ir. Mansur Mashum. Phd. Rektor UNRAM, Mataram NTB.
- 2) Penanggung II : Drs. H. Moch Sobidin Ritany SH. MH. Msc. MM. Rektor Universitas 45, Mataram NTB.

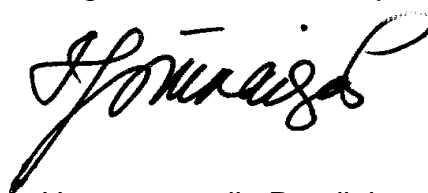
**e. Moderator** : Drs. A.A. Gede Oka Wisnumurti, M.Si;  
Dosen Fisip Warma Dewa, Denpasar Bali.

**D. KETENTUAN MAKALAH**

1. Panjang tulisan 10 sampai 20 halaman.
2. Diketik dengan spasi ganda, arial 12.
3. Makalah diserahkan dalam bentuk soft dan hard copy, paling lambat 7 hari sebelum hari H kepada panitia Seminar dengan alamat; Rindam IX/Udayana, Jalan Tendean NO. 01 Kediri-Tabanan, No. Fax : 0361-811872 E-mail : [rindam9@gmail.com](mailto:rindam9@gmail.com), Kontak person : Letkol Inf Ketut Budiastawa No. HP. 081563108562.

**E. PENUTUP.** Demikian Terms Of Reference (TOR) Seminar Nasional tentang “Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Melalui Binter Bersama Seluruh Komponen Bangsa Dalam Rangka Mendukung Kepentingan Nasional” ini dibuat agar dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam pembuatan makalah Seminar.

Denpasar, Januari 2009  
Panglima Kodam IX/Udayana



Hotmangaradja Pandjaitan  
Mayor Jenderal TNI

Lampiran : Daftar Pustaka.

---

TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT  
KOMANDO DAERAH MILITER IX/UDAYANA

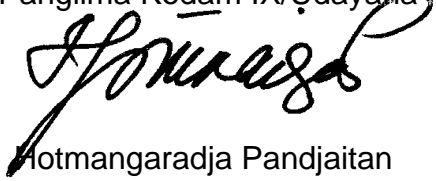
---

Lampiran “ Daftar Pustaka ” pada  
Terms Of Reference Seminar Nasional

---

**DAFTAR PUSTAKA**

1. Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945.
2. Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
3. Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara.
5. Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008. Peraturan Menteri pertahanan RI No: PER/03/M/II/208 tanggal 18 Februari 2008.
6. Strategi Pertahanan Negara, Peraturan Menteri Pertahanan RI No: PER/22/M/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007.
7. Doktrin Pertahanan Negara, Peraturan Menteri Pertahanan RI No: PER/23/M/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007.
8. Postur Pertahanan Negara, Peraturan Menteri Pertahanan RI No: PER/24/M/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007.
9. Doktrin Tentara Nasional Indonesia Tri Dharma Eka Karma (Tridek), Keputusan Panglima TNI No: KEP/2/I/2007 tanggal 12 Januari 2007.
10. Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi, Keputusan Kasad No: KEP/23/IV/2007 tanggal 24 April 2007.

Denpasar, Januari 2009  
Panglima Kodam IX/Udayana  
  
Hotmangaradja Pandjaitan  
Mayor Jenderal TNI